

Strategi Diversifikasi Energi Uni Eropa Pasca Krisis Ukraina melalui REPowerEU

Yanuar Rahmadan¹, Faurezi Samudra², Farid Ramadhony³

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta^{1,2,3}

yanuar.rahmadan@gmail.com¹

ABSTRAK

Eskalasi konflik Rusia-Ukraina pada Februari 2022 telah memicu krisis di Kawasan Eropa, termasuk mengancam keamanan energi negara-negara anggota Uni Eropa yang telah lama bergantung pada pasokan energi dari luar kawasan Eropa. Sebagai respon atas eskalasi konflik tersebut, Uni Eropa mengeluarkan paket kebijakan REPowerEU untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dari Rusia serta untuk memperkuat ketahanan energi kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi diversifikasi energi Uni Eropa melalui paket kebijakan REPowerEU hingga tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kerangka perspektif neorealisme dan konsep keamanan energi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Uni Eropa berhasil mengurangi ketergantungannya pada energi fosil dari Rusia melalui diversifikasi impor energi, terutama liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat dan melalui upaya percepatan transisi energi terbarukan. Meskipun demikian, kondisi ini turut menciptakan bentuk ketergantungan dan resiko baru, seperti volatilitas pasar LNG global, peningkatan biaya energi industri, ketergantungan terhadap teknologi energi bersih pada Tiongkok, serta munculnya potensi meningkatnya anggaran melalui paket kebijakan ReArm Europe.

Kata Kunci : Keamanan Energi, REPowerEU, Uni Eropa, Geopolitik Energi

ABSTRACT

The escalation of the Russia-Ukraine conflict in February 2022 triggered a crisis across the European region, including posing a significant threat to the energy security of European Union member states that have long relied on external energy supplies. In response to this escalation, the European Union introduced the REPowerEU policy to reduce its dependence on Russian fossil fuels and to strengthen regional energy resilience. This study aims to analyze the effectiveness of the European Union's energy diversification strategy through the REPowerEU policy up to 2025. This study employs a qualitative-descriptive approach, utilizing the theoretical framework of neorealism and the concept of energy security. The findings indicate that the European Union has successfully reduced its dependence on Russian fossil fuels through the diversification of energy imports, particularly liquefied natural gas (LNG) from the United States, as well as through accelerated efforts to expand renewable energy. Nevertheless, these developments have also generated new forms of dependency and strategic risks, including volatility in the global LNG market, increased industrial energy costs,

dependence on clean energy technologies from China, and the potential for increased budgetary pressures associated with defense-oriented initiatives such as the ReArm Europe policy package.

Keyword : *Energy Security, REPowerEU, European Union, Energy Geopolitics*

PENDAHULUAN

Keamanan energi merupakan salah satu fondasi bagi stabilitas politik dan kesejahteraan ekonomi bagi suatu negara, termasuk bagi Uni Eropa. Kesadaran akan pentingnya strategi keamanan energi Eropa pertama kali muncul secara kolektif saat terjadinya krisis minyak tahun 1970-an, yang kemudian memicu pendirian *International Energy Agency* (IEA) pada November 1974 yang bertujuan untuk membantu negara-negara industri maju merespon atas krisis pasokan minyak (Directorate-General for Energy of the European Commission, n.d). Sejak Peran IAE telah berkembang seiring berjalannya waktu dengan mencakup isu-isu terkait keamanan energi, pembangunan ekonomi, dan energi bersih. Negara-negara anggota pendiri IAE di antaranya adalah negara-negara di Kawasan Eropa, seperti Austria, Belgia, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Britania Raya.

Sebagai tindak lanjut dari inisiatif tersebut, muncul perdebatan publik terkait keamanan energi Uni Eropa yang tercermin dalam Laporan Akhir Green Paper (European Commission, 26 Juni 2002), yang menyoroti pengelolaan permintaan energi dan efisiensi energi sebagai prioritas strategis Uni Eropa (Zolotarova dan Lukash, 2025). Adanya pergeseran fokus dari upaya untuk memastikan keamanan pasokan minyak global melalui pendirian IAE, menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan energi yang terkoordinasi di tingkat Uni Eropa, khususnya ketika masing-masing negara anggota menghadapi kerentanan energi akibat faktor eksternal.

Sebelum munculnya eskalasi konflik di Ukraina, hubungan Kerjasama di sektor energi antara Uni Eropa dan Rusia telah terjalin dengan baik dan didasarkan pada paradigma interdependensi ekonomi. Hal ini dianggap sebagai landasan stabilitas dan perdamaian di Kawasan Eropa. Gazprom sebagai salah satu perusahaan energi terbesar

Rusia telah memasok sebanyak 45 persen hingga 50 persen dari kebutuhan gas alam negara-negara Uni Eropa hingga tahun 2021 (Badalov, 2025). Namun, dengan meningkatnya eskalasi konflik Rusia-Ukraina pada Februari 2022, Rusia mulai menggunakan pasokan energi sebagai salah satu instrumen tekanan politik kepada Uni Eropa dengan melakukan pengurangan pasokan gas alam melalui Nord Stream 1 secara sepihak. Rusia menggunakan mekanisme “*energy weaponization*” sebagai instrumen strategis dalam konteks perang Rusia–Ukraina, dengan mengenakan sanksi dan reorientasi arus distribusi energi, yang akhirnya memutus pasokan ke negara-negara yang dianggap “tidak bersahabat” (Quliyeva, 2025). Situasi ini menyebabkan kenaikan harga listrik di Eropa dari 15 Euro/MWh pada awal tahun 2021, menjadi lebih dari 100 Euro/MWh pada bulan Desember 2021 (Geoffron, 2026).

Sebagai bentuk respon atas situasi krisis tersebut, Uni Eropa pada Mei 2022 meluncurkan sebuah kerangka kebijakan “REPowerEU”. Melalui kebijakan REPowerEU, Uni Eropa secara bertahap menghentikan impor bahan bakar fosil dari Rusia, berupaya mengurangi konsumsi energi, melakukan diversifikasi sumber pasokan energi, serta mempercepat produksi dan pemanfaatan energi bersih (Directorate-General for Communication of the European Commission, n.d). REPowerEU juga berperan penting dalam melindungi masyarakat di negara-negara anggota dan sektor bisnis dari munculnya resiko kekurangan energi, serta mendukung Ukraina dengan melemahkan kapasitas pendanaan perang Rusia melalui pengurangan ketergantungan energi. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mempercepat transisi sistem energi yang lebih berkelanjutan dan berkontribusi pada stabilisasi harga energi di kawasan Uni Eropa.

Di tengah optimisme capaian REPowerEU di tahun 2025, di antaranya: penurunan volume impor gas dari Rusia secara signifikan (dari 150 miliar meter kubik (bcm) pada tahun 2021 menjadi 52 bcm pada tahun 2024), penurunan proporsi impor gas dari Rusia (dari 45 persen menjadi hanya 19 persen), muncul resiko-resiko yang berasal dari faktor eksternal (Directorate-General for Energy of the European Commission, n.d(b)). Resiko-resiko tersebut di antaranya gejolak di pasar LNG global serta peningkatan anggaran Uni Eropa untuk pertahanan nasional melalui rencana

“ReArm Europe”. Situasi ini membuat Uni Eropa semakin bergantung pada pasokan teknologi bersih yang disediakan oleh Tiongkok.

Beberapa studi terdahulu membahas pada tiga topik penelitian utama: perubahan cara pandang Uni Eropa terhadap isu keamanan energi, strategi diversifikasi energi beserta resiko yang dihadapi oleh Uni Eropa, serta implikasi geopolitik dan pergeseran prioritas kebijakan dalam jangka panjang. Pertama, beberapa studi menekankan bahwa perang Rusia-Ukraina telah mendorong perubahan dalam cara Uni Eropa memahami isu keamanan energi. Penelitian dari Hazra dan Kumar (2025) menunjukkan bahwa transisi energi tidak dapat hanya berfokus pada dekarbonisasi, namun juga harus tetap mempertimbangkan ketahanan terhadap situasi eksternal, termasuk dengan meningkatnya eskalasi konflik Rusia-Ukraina. Penelitian dari LaBelle (2024) juga menjelaskan bahwa Uni Eropa semakin bergerak dari pendekatan interdependensi tradisional menuju bentuk solidaritas energi yang lebih terinstitusionalisasi, di mana negara-negara anggota secara kolektif memperkuat kapasitas dan keamanan energi mereka.

Studi lainnya dari Badalov (2025) menunjukkan bahwa peningkatan impor LNG menjadi salah satu solusi guna mengurangi ketergantungan impor energi dari Rusia. Meskipun demikian, situasi ini juga membuat Uni Eropa lebih terpapar pada fluktuasi harga LNG di pasar global. Penelitian dari Vošta (2025) juga menambahkan bahwa pergeseran ini semakin mempererat hubungan energi Uni Eropa dengan Amerika Serikat. Sejalan dengan itu, Jerzyniak (2024) memperkenalkan konsep “*de-risking*” sebagai bagian dari upaya Uni Eropa untuk mengurangi resiko dari ketergantungan eksternal. Lebih lanjut, beberapa penelitian menunjukkan adanya konsekuensi geopolitik dari perubahan kebijakan energi Uni Eropa. Vezzoni (2025) mencatat bahwa peningkatan agenda keamanan dan pertahanan, khususnya melalui inisiatif ReArm Europe, berpotensi memengaruhi komitmen jangka panjang Uni Eropa terhadap transisi energi. Studi terdahulu yang ada masih cenderung membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis sejauh mana kebijakan REPowerEU dapat mendorong upaya

diversifikasi energi Uni Eropa, serta apa saja tantangan geopolitik dan ekonomi yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam upaya transisi energi yang berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Perspektif Neorealisme

Perspektif neorealisme muncul sebagai pengembangan dari perspektif realisme klasik dengan kerangka utamanya dikemukakan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya "*Theory of International Politics*". Seperti halnya realisme klasik, neorealisme juga berangkat dari asumsi bahwa sistem internasional bersifat anarkis, di mana tidak adanya otoritas tertinggi yang dapat mengatur dan memaksa negara-negara di dunia. Selain itu, neorealisme juga menempatkan negara sebagai aktor utama (*state-centric*). Negara dipandang sebagai entitas berdaulat yang bertindak secara mandiri dan berinteraksi dengan negara lain dalam sistem internasional. Meskipun demikian, neorealisme memberikan penekanan pada struktur sistem internasional sebagai faktor yang dapat membentuk perilaku negara. Dengan kata lain, tindakan negara lebih dipengaruhi oleh posisi dan tekanan struktural dalam sistem, bukan dari preferensi atau kepentingan dalam negeri nya (Česnakas, 2010).

Pada perspektif neorealisme, sifat dasar manusia dan ambisi pemimpin (motivasi individu atau karakteristik domestik negara) tidak menjadi variabel utama, kecuali asumsi dasar bahwa semua negara memiliki tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, neorealisme berasumsi bahwa negara cenderung berperilaku serupa karena menghadapi tekanan struktural yang sama, dengan *survival* sebagai tujuan utama, bukan sekadar akumulasi kekuasaan. Selain itu, Waltz juga melihat negara sebagai aktor rasional yang berperilaku dalam batasan sistem internasional. Perspektif neorealisme berfokus pada bagaimana negara dapat menyesuaikan diri dengan struktur sistem internasional (Česnakas, 2010).

Meskipun semua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu bertahan hidup, kemampuan dari masing-masing negara untuk mencapainya dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, kekuasaan menjadi penting karena dipandang sebagai sarana untuk menjamin keamanan negara. Dengan demikian, negara terdorong untuk tetap bersaing dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan demi memastikan kelangsungan dan keamanannya (Česnakas, 2010).

Konsep Keamanan Energi

Konsep keamanan energi telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada periode krisis energi tahun 1970-an, energi dipandang sebagai sumber daya strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas negara dan kelangsungan sistem nasional. Namun, seiring dengan liberalisasi pasar dan semakin terintegrasinya sistem energi global, energi mulai dipahami tidak hanya sebagai aset strategis, namun juga sebagai komoditas ekonomi yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar, perdagangan internasional, dan fluktuasi harga. Perkembangan ini memperluas definisi keamanan energi itu sendiri. Konsep keamanan energi tidak lagi terbatas pada isu geopolitik atau keamanan negara, namun juga mencakup aspek stabilitas ekonomi, ketahanan sistem energi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Ramadhani, 2017).

Meskipun demikian, perluasan definisi keamanan energi memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana konsep keamanan energi perlu diperluas. Sebagian berpendapat bahwa definisi dari keamanan energi harus mencerminkan kompleksitas ancaman yang terbaru, sementara yang lain berupaya untuk mempertahankan fokus pada dimensi keamanan yang berkaitan langsung dengan kelangsungan negara. Dalam konteks ini, keamanan energi pada dasarnya merujuk pada kemampuan negara untuk memastikan ketersediaan pasokan energi yang stabil, berkelanjutan, dan mudah untuk diakses, sehingga negara mampu menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan fungsi sistem nasional, dan mengurangi kerentanan terhadap tekanan atau gangguan eksternal (Ramadhani, 2017).

Pembahasan**Diversifikasi dan Transformasi Energi Uni Eropa (2021-2025)**

Hingga awal tahun 2025, Uni Eropa menunjukkan capaian yang transformasi impor energi, di mana terjadi penurunan tingkat konsumsi gas alam (pipeline dan LNG) menjadi 332 miliar m³ pada tahun 2024, atau 20 persen lebih rendah dibandingkan tingkat konsumsi pada tahun 2021 (Agroreview, 2025). Penurunan ini mencerminkan adanya pergeseran dalam komposisi bauran energi primer Uni Eropa. Sejalan dengan perubahan tersebut, pangsa pasar impor gas Rusia turut mengalami penurunan (18,9

persen pada tahun 2024) yang menandakan semakin berkurangnya ketergantungan energi Uni Eropa terhadap gas dari Rusia yang digantikan dengan impor gas dari Amerika Serikat dengan nilai impor yang mencapai hampir 19 miliar Euro (Hueck et al, 2025). Pada kuartal pertama tahun 2025, struktur pasokan gas Uni Eropa menunjukkan perubahan signifikan dengan Norwegia mempertahankan posisinya sebagai pemasok utama dengan pangsa 31% persen dari total impor, diikuti oleh Amerika Serikat yang secara resmi melampaui Rusia dan menempati posisi kedua dengan pangsa sebesar 24 persen (Hueck et al, 2025).

Keberhasilan diversifikasi ini turut didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG secara luas di Eropa. Selama periode 2021 hingga 2023, Uni Eropa telah meningkatkan kapasitas regasifikasinya sebesar 33 persen melalui investasi infrastruktur. Hal ini mencerminkan upaya yang sistematis untuk memperkuat keabilitas Uni Eropa dalam impor LNG.

Hingga awal tahun 2025, tercatat telah terdapat 33 terminal LNG berskala besar yang telah beroperasi di Eropa, dengan total kapasitas tahunan mencapai 215 miliar meter kubik (Badalov, 2025; Hueck et al, 2025). Sebagian dari kapasitas tersebut berasal dari penggunaan “*floating storage and regasification units*” atau FSRU yang mencakup 29 persen dari total kapasitas dan memberikan fleksibilitas operasional, terutama bagi negara-negara yang sebelumnya tidak memiliki infrastruktur LNG. Jerman menjadi salah satu negara yang mengoperasikan sejumlah terminal FSRU yang dibangun dalam waktu relatif singkat, sehingga memungkinkan Jerman untuk mengimpor LNG secara langsung untuk memperkuat ketahanan energi nya (Badalov, 2025; Lukas et al., 2025).

Roadmap REPowerEU 2025

European Commission pada Mei 2025 mempublikasikan peta jalan REPowerEU yang berisi langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Uni Eropa untuk secara bertahap mengakhiri ketergantungan terhadap impor energi Rusia. Peta jalan REPowerEU juga berisi rencana pelarangan impor gas Rusia melalui kontrak baru dan kontrak spot sejak tahun 2025, serta secara penuh menghentikan seluruh kontrak jangka panjang paling lambat pada tahun 2027. Sejalan dengan itu, negara-negara anggota Uni Eropa diminta untuk menyusun rencana diversifikasi dalam negerinya

masing-masing, yang kemudian dipresentasikan pada Maret 2026, dengan tujuan untuk menghentikan impor minyak mentah dan produk turunannya dari Rusia.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Uni Eropa juga meluncurkan *EU Energy and Raw Materials Platform* sebagai sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk mendukung perusahaan-perusahaan Eropa dengan memanfaatkan kekuatan kolektif pasar Uni Eropa guna meningkatkan daya saing industri, menjamin keamanan pasokan energi dan bahan baku, serta mempercepat transisi menuju dekarbonisasi (Directorate-General for Energy of the European Commission, n.d(c)). Platform ini menyediakan kerangka koordinasi untuk berbagai mekanisme pengadaan dan kerja sama, yang pada tahap awal mencakup hidrogen, bahan baku kritis, biomethane, LNG, dan gas alam.

Selain melalui diversifikasi pasokan, REPowerEU juga menempatkan energi terbarukan sebagai pilar utama keamanan energi Uni Eropa. Pada tahun 2023, energi terbarukan menyumbang 44,7 persen dari total produksi listrik Uni Eropa (Eurostat, 2024). Data ini menunjukkan bahwa energi terbarukan telah melampaui kontribusi bahan bakar fosil Uni Eropa sebesar 32,5 persen (Eurostat, 2024). Sementara itu, energi terbarukan yang berasal dari tenaga angin untuk pertama kalinya telah menghasilkan listrik lebih besar dibandingkan yang berasal dari gas alam (Eurostat, 2024). Kontribusi dari energi surya juga mengalami peningkatan, naik 40% persen dibandingkan tahun 2022, di mana hal ini dapat terjadi karena didorong oleh percepatan reformasi perizinan melalui kerangka Fit for 55.

Meskipun demikian, pertumbuhan positif ini memunculkan tantangan baru bagi Uni Eropa terkait sifat intermiten energi terbarukan yang memerlukan modernisasi sistem jaringan kelistrikan. Total investasi yang dibutuhkan oleh Uni Eropa sebesar 584 miliar Euro hingga tahun 2030 untuk memperkuat dan mendigitalisasi jaringan listrik sehingga mampu mengintegrasikan sumber energi terbarukan secara optimal (European Investment Bank, 2023). Selain itu, adanya potensi ketidakstabilan cuaca di Kawasan Eropa, di mana terjadi penurunan kecepatan angin secara signifikan pada awal tahun 2025 sehingga mengurangi produksi listrik tenaga angin hingga 17–22 persen (Directorate-General for Energy of the European Commission, 2025). Sebagai contoh, dengan total produksi 63,5 miliar kilowatt jam (kWh) selama periode Januari hingga akhir Maret 2025, pembangkit energi terbarukan di Jerman menghasilkan listrik 16 persen lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada kuartal pertama

tahun 2024 (Wehrmann, 2025). Kondisi ini kemudian memaksa beberapa negara anggota Uni Eropa untuk tetap menggunakan sumber energi dari gas dan batu bara guna menjaga stabilitas pasokan listrik.

Kebijakan REPowerEU juga memberikan dampak terhadap ekonomi, seperti pada tahun 2024 di mana biaya energi industri di kawasan Uni Eropa tercatat lebih tinggi 10 persen, yang diakibatkan peningkatan 34 persen dari total biaya operasional seperti kebutuhan bahan bakar, bahan baku, dan listrik (Brugman et al, 2025). Tingginya biaya energi ini berdampak pada menurunnya daya saing sektor manufaktur serta mendorong terjaidnya deindustrialisasi di sektor-sektor intensif energi seperti industri petrokimia, baja, dan semen, di mana sebagian produksi mulai dialihkan ke negara yang memiliki biaya energi yang lebih rendah.

Pada saat yang sama, total tagihan impor energi Uni Eropa mencapai 375,9 miliar Euro (Eurostat, 2025), di mana mencerminkan beban ekonomi yang substansial selama masa transisi energi. Menanggapi kondisi ini, Uni Eropa meluncurkan Clean Industrial Deal pada Februari 2025 yang menetapkan serangkaian kesepakatan strategis untuk mentransformasi dekarbonisasi menjadi motor pertumbuhan bagi sektor industri Eropa (Directorate-General for Communication of the European Commission, n.d(b)). Kesepakatan ini termasuk upaya untuk menurunkan biaya energi, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan pembentukan lingkungan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan.

Implementasi REPowerEU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural di tingkat nasional, di antaranya, berdasarkan evaluasi terhadap National Energy and Climate Plans (NECP), 40 persen target di tingkat nasional belum sepenuhnya selaras dengan target kolektif Uni Eropa, di mana target yang telah ditetapkan yakni untuk mencapai 42,5 persen pangsa energi terbarukan pada tahun 2030. Selain itu, laju pertumbuhan energi terbarukan selama periode tahun 2022-2024 memiliki rata-rata 1,15 persen per tahun, jauh di bawah target yang dibutuhkan. Dengan kondisi demikian, pangsa energi terbarukan di kawasan Uni Eropa diperkirakan hanya akan mencapai sekitar 30 persen pada tahun 2030.

Masalah lain yang juga muncul yakni adanya kesenjangan kapasitas dan kesiapan antarnegara anggota Uni Eropa sehingga menjadi salah satu factor penghambat bagi konsolidasi solidaritas energi kawasan. Negara-negara seperti

Denmark dan Finlandia telah melakukan investasi yang signifikan pada sektor energi terbarukan dari angin lepas pantai dan telah memodernisasi jaringan. Sementara itu, beberapa negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan warisan ketergantungan pada energi fosil dari Rusia. Kondisi ini diakibatkan oleh adanya hambatan birokrasi dalam proses perizinan proyek energi terbarukan. Hal ini membuat European Commission mengambil langkah hukum strategis yang bertujuan untuk mempercepat berlangsungnya reformasi terkait infrastruktur dan peraturan hukum di tingkat nasional negara-negara anggota.

Ketergantungan Uni Eropa pada Tiongkok dan Pergeseran "ReArm Europe"

Pasca eskalasi konflik Rusia-Ukraina di tahun 2022 muncul sebuah kondisi yang disebut sebagai "*new interdependence paradox*", di mana dalam upayanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil Rusia, Uni Eropa memiliki ketergantungan baru terhadap Tiongkok dalam rantai pasokan teknologi energi bersih. Pembuat kebijakan Uni Eropa pada akhirnya memilih pendekatan "*de-risking*" dengan Tiongkok sebagai pendekatan strategis yang bersifat non-konfrontatif untuk tetap memasukkan pertimbangan keamanan nasional ke dalam kebijakan ekonomi (Lipke et al, 2024). Hal ini berarti bahwa agenda perubahan iklim dan transisi energi ditempatkan sebagai sarana untuk mempertahankan kerja sama yang konstruktif dengan Tiongkok.

Uni Eropa tetap menghadapi ketergantungan dalam rantai pasokan teknologi energi bersih di mana perusahaan Tiongkok terhitung sebagai pemasok setidaknya 90 persen modul surya fotovoltaik di Eropa serta mendominasi produksi polisilikon global dengan pangsa dua pertiga di seluruh dunia (Lipke et al, 2024). Meskipun demikian, sekitar 40 persen produksi polisilikon tersebut berlokasi di Provinsi Xinjiang, wilayah yang menuai kritik internasional terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (Lipke et al, 2024). Kondisi ini sebenarnya dapat menimbulkan resiko geopolitik dan normatif bagi Uni Eropa dikarenakan Uni Eropa dilihat sebagai aktor yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), namun Uni Eropa masih terlibat dalam rantai pasokan dari Tiongkok tersebut.

Pada tahun 2025, Uni Eropa menunjukkan adanya pergeseran prioritas kebijakan dari agenda transisi energi hijau menuju kepada agenda keamanan dan pertahanan, sebagaimana tercermin dalam inisiatif "ReArm Europe." Hal ini terlihat

denagn adanya peningkatan anggaran militer sebagai respon terhadap eskalasi ancaman keamanan di perbatasan timur Eropa. Hal ini berpotensi mengurangi alokasi pendanaan yang sebelumnya ditujukan untuk mendukung transisi energi melalui berbagai instrumen kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya.

Kondisi ini juga mencerminkan dilema kebijakan, di mana Uni Eropa dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kebijakan strategis terkait keamanan tradisional dan komitmen terhadap transformasi energi berkelanjutan. Transisi energi Uni Eropa saat ini tidak lagi bisa dipandang sebagai agenda lingkungan, melainkan semakin dipengaruhi oleh pertimbangan realpolitik dan keamanan strategis (Vezzoni, 2025). Meskipun REPowerEU pada awalnya dirancang sebagai inisiatif untuk memperkuat keamanan energi dan mempercepat transisi energi bersih, perkembangan terbaru dalam kebijakan anggaran Uni Eropa menunjukkan adanya pergeseran prioritas strategis yang lebih luas. Melalui rencana seperti ReArm Europe yang berfokus pada peningkatan belanja dan kapasitas pertahanan, Uni Eropa pada akhirnya harus menyesuaikan berbagai instrumen pendanaannya agar dapat mengakomodasi kebutuhan sektor militer. Dengan demikian, keterkaitan antara REPowerEU dan ReArm Europe menunjukkan bagaimana tekanan geopolitik memengaruhi distribusi sumber daya strategis di tingkat Uni Eropa.

Kesimpulan

Kebijakan REPowerEU telah memainkan peran penting dalam memperkuat keamanan energi Uni Eropa pasca eskalasi konflik Rusia-Ukraina di tahun 2022 sehingga menyebabkan terjadinya krisis energi di kawasan Eropa. Melalui berbagai kerangka kebijakan REPowerEU seperti diversifikasi pasokan, peningkatan impor LNG dari mitra alternatif seperti Amerika Serikat, serta percepatan pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur regasifikasi, Uni Eropa berhasil mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil dari Rusia secara signifikan. Kebijakan REPowerEU juga menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya didorong oleh pertimbangan lingkungan, tetapi juga oleh imperatif keamanan strategis. Dalam perspektif neorealisme, langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya rasional aktor untuk mengurangi kerentanan struktural dan mempertahankan otonomi strategis di tengah ketidakpastian geopolitik.

Namun demikian, transformasi ini juga menghasilkan bentuk ketergantungan dan tantangan baru. Uni Eropa kini menghadapi paparan resiko yang juga lebih besar, seperti terhadap volatilitas pasar energi global serta ketergantungan pada rantai pasokan teknologi energi bersih yang berasal dari Tiongkok. Pada saat yang sama, tingginya biaya energi, kebutuhan investasi infrastruktur, serta meningkatnya prioritas keamanan dan pertahanan menciptakan *trade-off* dalam alokasi sumber daya Uni Eropa sebagai sebuah institusi. Dengan demikian, REPowerEU tidak hanya merepresentasikan proyek transisi energi, tetapi juga bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas, di mana keberhasilan jangka panjang dari REPowerEU akan ditentukan oleh kemampuan Uni Eropa untuk menyeimbangkan keamanan energi, daya saing ekonomi, dan otonomi strategis secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agroreview (2025). *Gas Consumption in the EU in 2024: Increase in Consumption and Decrease in Imports*. Agroreview Website. Diakses dari <https://agroreview.com/en/newsen/agripolicy/gas-consumption-the-2024-increase/>
- Badalov, E. (2025). LNG: Europe's Energy Supply Security Amid Geopolitical Turmoil– Transforming Dependence into Resilience. *The Journal of International Scientific Researches*, 10(2), 294–305. <https://doi.org/https://doi.org/10.23834/isrjournal.1656004>
- Brugman, E., Debrabander, F., Mills, N. F., Horton, R., Saelens, M., dan Vercammen, S. (2025). *Closing the European competitiveness gap*. Deloitte Finlandia Website. Diakses dari <https://www.deloitte.com/fi/fi/Industries/energy/perspectives/closing-the-european-competitiveness-gap.html>
- Česnakas, G. (2010). Energy Resources in Foreign Policy: A Theoretical Approach, *Baltic Journal of Law & Politics*, 3(1), 30-52, DOI: 10.2478/v10076-010-0003-y
- Directorate-General for Communication of the European Commission. (n.d). *REPowerEU: Affordable, secure and sustainable energy for Europe*. European Commission Website. Diakses dari https://commission.europa.eu/topics/energy/repowereu_en

- Directorate-General for Communication of the European Commission. (n.d(b)). *Clean Industrial Deal: A plan for EU competitiveness and decarbonisation*. European Commission Website. Diakses dari https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/clean-industrial-deal_en
- Directorate-General for Energy of the European Commission. (n.d). *International Energy Agency: Committed to shaping a secure and sustainable energy future for all*. European Commission Website. Diakses dari https://energy.ec.europa.eu/topics/international-cooperation/international-organisations-and-initiatives/international-energy-agency_en
- Directorate-General for Energy of the European Commission. (n.d(b)). *REPowerEU - 3 years on*. European Commission Website. Diakses dari https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/repowereu-3-years_en
- Directorate-General for Energy of the European Commission. (n.d(c)). *EU Energy and Raw Materials Platform*. European Commission Website. Diakses dari https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/eu-energy-and-raw-materials-platform_en
- Directorate-General for Energy of the European Commission. (2025). *Quarterly reports highlight solar record and progress away from Russian gas*. European Commission Website. Diakses dari https://energy.ec.europa.eu/news/quarterly-reports-highlight-solar-record-and-progress-away-russian-gas-2025-07-04_en
- European Investment Bank. (2023). *Investing in grids to power the energy transition*. European Investment Bank Website. Diakses dari <https://www.eib.org/en/press/news/investing-in-grids-to-power-the-energy-transition>
- Eurostat. (2024). *Renewables take the lead in power generation in 2023*. Eurostat Website. Diakses dari <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240627-1>
- Eurostat. (2025). *Imports of energy products to the EU down in 2024*. Eurostat Website. Diakses dari <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250321-1>
- Geoffron, P. (2026). *Reforming the Electricity Market in Europe: Can Europe stabilise prices without fragmenting the internal market?*. European Macro Policy Network (Policy Brief). Diakses dari <https://empn.eu/publication/reforming-electricity-market-europe/>

- Hueck, L., Kreysel, M., dan Schiffer, H. (2025). Geopolitics and Europe's Natural Gas Supply, *Intereconomics*, 60(6), 346-354. DOI: 10.2478/ie-2025-0068
- Lipke, A., Oertel, J., dan O'Sullivan, D. (2024). *Trust and trade-offs: How to manage Europe's green technology dependence on China*. European Council on Foreign Relations Website. Diakses dari <https://ecfr.eu/publication/trust-and-trade-offs-how-to-manage-europes-green-technology-dependence-on-china/>
- Quliyeva, A. (2025). Energy Weaponization in the Ukraine–Russia War: Sanctions, Rerouting Flows, and Implications for Smaller States. *Journal of Strategic Security*, 18(4). <https://doi.org/10.5038/1944-0472.18.4.2577>
- Ramadhani, A. (2017). Evolusi Konsep Keamanan Energi, *Global: Jurnal Politik Internasional*, 19(2), 98-120, DOI: 10.7454/global.v19i2.307
- Vezzoni, R. (2025). From REPower to ReArm Europe: A Lopsided Geopolitics Foretelling Ecological Breakdown. *Intereconomics: Review of European Economic Policy*, 60(6), 323–328. <https://doi.org/10.2478/ie-2025-0064>
- Wehrmann, B. (2025). *Weak winds eat up generation capacity gains in Germany's renewable fleet in early 2025*. Clean Energy Wire Website. Diakses dari <https://www.cleanenergywire.org/news/weak-winds-eat-generation-capacity-gains-germanys-renewable-fleet-early-2025>
- Zolotarova, O. dan Lukash, D. (2025). EU energy security amid geopolitical change. *Scientia Fructuosa*, 163(5), 80–92. [https://doi.org/https://doi.org/10.31617/1.2025\(163\)05](https://doi.org/https://doi.org/10.31617/1.2025(163)05)